

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN YAHUKIMO

2023



INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

KABUPATEN YAHUKIMO

2023



**Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)
Kabupaten Yahukimo
Tahun 2023**

ISSN:

No. Publikasi: 94160.2361

Katalog BPS: 7102025.9416

Ukuran Buku: 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman : iv + 51 Halaman

Naskah : BPS Kabupaten Yahukimo

Gambar Sampul: BPS Kabupaten Yahukimo

Ilustrasi Sampul: BPS Kabupaten Yahukimo

Diterbitkan Oleh: © BPS Kabupaten Yahukimo

Dicetak Oleh: BPS Kabupaten Yahukimo

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk
tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**



KATA PENGANTAR

Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Yahukimo Tahun 2023 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Yahukimo. Publikasi ini memuat informasi angka Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Yahukimo yang disajikan dalam bentuk tabel dan peta wilayah. IKK adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan dengan kota acuan. Kota acuan yang digunakan adalah Kota Makassar.

Data yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK) yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Data yang diolah berasal dari data harga triwulan III, dan IV tahun 2022 serta triwulan I dan II tahun 2023 dan data *Bill of Quantity* (BoQ)

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penerbitan publikasi ini dengan harapan data yang disajikan dapat bermanfaat untuk semua.

Dekai, Desember 2023
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Yahukimo

Elijoi Naibaho, SST, M.Stat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
1. Variabel Kebutuhan Fiskal.....	7
2. Variabel Kapasitas Fiskal.....	12
B. TUJUAN	12
C. RUANG LINGKUP.....	13
BAB II KONSEP DAN DEFINISI	14
BAB III METODOLOGI	26
A. PAKET KOMODITAS.....	26
B. DIAGRAM TIMBANG	27
1. Diagram Timbang Kelompok Jenis Bangunan/Konstruksi.....	27
2. <i>Bill of Quantity</i>	30
C. KEGIATAN PENGUMPULAN DATA	31
D. IDENTIFIKASI KUALITAS BARANG.....	32
E. FORMULA PENGHITUNGAN IKK 2023.....	33
BAB IV ANALISIS IKK KABUPATEN YAHUKIMO.....	38
A. PROFIL KABUPATEN YAHUKIMO	38
B. IKK KABUPATEN YAHUKIMO.....	42
DAFTAR PUSTAKA	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1. IKK Beberapa Kabupaten di Sekitar Kabupaten Yahukmo Tahun 2023	43
Tabel 2. Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Provinsi 2023	46
Tabel 3. Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua, 2023	48

<https://yahukimokab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Besaran Dana Alokasi Umum Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004	3
Gambar 2. Komponen Dana Alokasi Umum Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004	11
Gambar 3. Peta Kabupaten Yahukimo	40
Gambar 4. Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Provinsi 2023.....	47
Gambar 5. Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	49

<https://yahukimokab.bps.go.id>

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Otonomi daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 dan direvisi melalui UU No. 32 tahun 2004 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah otonom diberikan wewenang untuk melakukan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Sesuai UU Nomor 25 tahun 1999 yang direvisi melalui UU Nomor 33 tahun 2004 dan PP 55 tahun 2005, untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi tersebut, pemerintah akan mengalokasikan dana berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari Pendapatan APBN dan dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. DAU merupakan instrumen transfer yang bertujuan

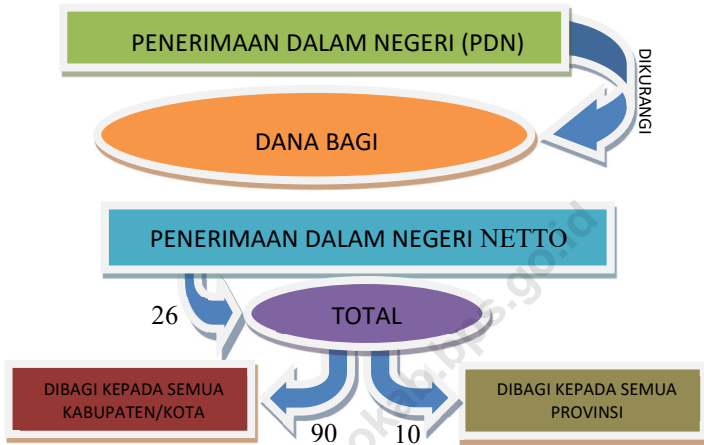
PENDAHULUAN

untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antardaerah, sekaligus pemeratakan kemampuan antardaerah (*equalization grant*).

Dalam UU No. 25 tahun 1999 juga dinyatakan bahwa sekurang-kurangnya jumlah DAU adalah 25% dari total penerimaan dalam negeri netto pada APBN, untuk periode transisi dinyatakan 25.5% dan untuk tahun 2008 dinyatakan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto. Dengan demikian alokasi DAU murni telah diterapkan mulai tahun anggaran 2008. Dengan diterapkannya formula DAU murni, ada kemungkinan suatu daerah mendapat DAU lebih rendah atau tidak mendapatkan DAU seperti Bengkalis, Rokan Hilir, Siak, Natuna, dan Kutai Kartanegara. Total besar DAU secara umum digambarkan sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Gambar 1. Besaran DAU Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004



Sumber: Ditjen Perimbangan Keuangan, 2007 dalam Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, Departemen Keuangan

Komponen Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2004 terdiri dari dua komponen yaitu Alokasi Dasar (AD) dan Celah Fiskal (CF) dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$DAU = AD + CF$$

DAU = Dana Alokasi Umum

AD = Alokasi Dasar

CF = Celah Fiskal

Alokasi Dasar

PENDAHULUAN

Pada pasal 27 ayat 4 disebutkan bahwa alokasi dasar (AD) dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah, berbeda dengan formula DAU berdasarkan UU Nomor 25 tahun 1999 yang terdiri dari belanja pegawai dan lumpsum. Penghitungan Alokasi Dasar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2005 didasarkan atas:

- Realisasi Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah termasuk peningkatan gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan PPh pasal 21 dengan rata-rata 15%
- Kenaikan Tunjangan Jabatan Fungsional dan Struktural
- Tingkat Pertumbuhan (Accres) 2,5%
- Gaji Bulan ke-13
- Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah

Pada UU nomor 33 tahun 2004, komponen belanja hanya belanja pegawai sipil daerah. Komponen belanja pegawai untuk masing-masing daerah (misal daerah A) dapat dirumuskan sebagai berikut:

Alokasi DAU dari komponen belanja pegawai daerah A

=

$$\frac{\text{Belanja Pegawai Daerah A}}{\text{Total Belanja Pegawai Seluruh Daerah}} \times \text{Total Alokasi DAU dari Komponen Belanja Pegawai}$$

PENDAHULUAN

Celah Fiskal (CF)

Celah fiskal merupakan selisih dari kebutuhan fiskal dan kapasitas atau potensi fiskal daerah tersebut. Kebutuhan fiskal daerah secara umum mengindikasikan perkiraan besarnya kebutuhan anggaran yang diperlukan oleh daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang diukur dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia sedangkan kapasitas fiskal merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil (DBH Pajak dan DBH SDA) yang mencerminkan kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan tersebut. Pengalokasian DAU berdasarkan formula dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CF = \text{Kebutuhan Fiskal } (K_bF) - \text{Kapasitas Fiskal } (K_pF)$$

$$K_bF = TBR (IP + IW + IKK + IPM + IPDRB)$$

$$K_pF = PAD + DBH \text{ Pajak} + DBH \text{ SDA}$$

Dimana:

CF = Celah Fiskal

K_bF = Kebutuhan Fiskal

TBR = Total Belanja Rata-Rata APBD

PENDAHULUAN

IP	= Indeks Jumlah Penduduk
IW	= Indeks Luas Wilayah
IPM	= Indeks Pembangunan Manusia
IKK	= Indeks Kemahalan Konstruksi
IPDRB	= Indeks PDRB Perkapita
α	= Bobot Indeks
Kpf	= Kapasitas Fiskal
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
DBH Pajak	= Dana Bagi Hasil Pajak
DBH SDA	= Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Sumber Daya Alam

Kebijakan *hold harmless* atau alokasi DAU yang tidak boleh lebih rendah dibandingkan DAU sebelumnya yang tidak berlaku lagi sejak tahun 2008 berdampak pada perolehan DAU yang sepenuhnya berdasar formula DAU (penghitungan DAU murni). Sehingga dalam mengatasi ketimpangan kemampuan fiskal antar daerah, ada beberapa kemungkinan penghitungan celah fiskal maupun DAU:

1. Apabila Celah Fiskal positif ($CF > 0$) atau kebutuhan fiskal lebih besar dari pada kapasitas fiskal, maka daerah akan menerima DAU sebesar alokasi dasar ditambah dengan nilai Celah Fiskal.

PENDAHULUAN

2. Apabila Celah Fiskal sama dengan nol ($CF=0$) atau kebutuhan fiskal sama dengan kapasitas fiskal, maka daerah akan menerima DAU sebesar alokasi dasar.
3. Apabila Celah Fiskal negatif ($CF<0$) atau kebutuhan fiskal lebih kecil daripada kapasitas fiskal dan nilai celah fiskal lebih kecil dari alokasi dasar, maka daerah akan menerima DAU sebesar alokasi dasar dikurangi dengan nilai celah fiskal.
4. Apabila Celah Fiskal negatif ($CF<0$) atau kebutuhan fiskal lebih kecil daripada kapasitas fiskal dan nilai celah fiskal sama atau lebih besar dari alokasi dasar, maka hasil penghitungan DAU adalah nol atau negatif. Untuk kasus negatif akan disesuaikan menjadi nol yang berarti daerah tidak menerima DAU.

1. Variabel Kebutuhan Fiskal

Variabel kebutuhan fiskal suatu daerah hendaknya dapat mengakomodir kebutuhan suatu daerah yang digunakan untuk pembiayaan program-program daerah dan pembangunan fasilitas daerah seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kebutuhan pokok lainnya. Variabel-variabel yang digunakan disini juga diharapkan mampu untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan tersebut secara umum, sehingga dapat terbentuk suatu rumusan yang sederhana dan mudah dihitung oleh daerah dengan data yang mudah

PENDAHULUAN

didapatkan. Berikut variabel kebutuhan fiskal yang digunakan dalam penghitungan Dana Alokasi Umum.

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk suatu daerah mencerminkan kebutuhan pelayanan yang diperlukan. Pelayanan tersebut dapat meliputi beberapa aspek, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dan lainnya.

Untuk membedakan kebutuhan satu daerah dengan daerah lain berdasarkan jumlah penduduk, maka dibuatlah indeks penduduk.

Indeks penduduk dihitung dengan cara:

$$IP_i = \frac{P_i}{\bar{P}}$$

$$\bar{P} = \frac{\sum_{i=1}^n P_i}{n}$$

dimana:

IP_i = Indeks Penduduk Daerah i

P_i = Jumlah Penduduk Kabupaten /Kota ke i

\bar{P} = Jumlah Penduduk Rata – Rata

n = Jumlah kabupaten/kota

b. Luas Wilayah

Daerah dengan cakupan wilayah yang luas membutuhkan pembiayaan yang lebih besar, maka dibentuklah suatu indeks untuk

PENDAHULUAN

membedakan besaran luas wilayah tersebut. Hal tersebut yang dijadikan alasan oleh penyusun untuk digunakannya variabel luas wilayah. Data luas wilayah bersumber dari Departemen Dalam Negeri dan BIG. Apabila terdapat perbedaan luas daerah yang cukup besar, maka digunakan luas daerah yang memiliki tingkat densitas yang memenuhi kewajaran. Indeks Wilayah tersebut adalah:

$$\text{Indeks Wilayah } i = \frac{\text{Luas Daerah } i}{\text{Rata-Rata Luas Dae} \quad \text{Secara Nasional}}$$

c. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan daerah dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Sebagai indikator untuk mengukur variabel kemajuan pembangunan di daerah digunakan IPM sebagai pengganti dari Indeks Kemiskinan yang telah digunakan sebelumnya.

Komponen IPM meliputi angka harapan hidup waktu lahir, indeks pendidikan yang terdiri dari angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah dan Indeks daya beli berdasarkan Pendapatan Bruto Domestik per kapita. Penghitungan masing-masing indeks memperhatikan nilai maksimum dan minimum standar UNDP.

PENDAHULUAN

d. Indeks Kemahalan Konstruksi

Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK) merupakan cerminan dari suatu nilai bangunan/konstruksi, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan ukuran luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi. TKK diperoleh melalui pendekatan terhadap harga sejumlah bahan bangunan/konstruksi dan harga sewa alat berat yang mempunyai nilai atau andil cukup besar dalam bangunan tersebut.

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan TKK suatu kabupaten/kota atau provinsi terhadap TKK kabupaten/kota atau provinsi lain. Sesuai dengan pengertiannya, IKK dapat dikategorikan sebagai indeks spasial, yaitu indeks yang menggambarkan perbandingan harga untuk daerah/wilayah yang berbeda pada periode waktu tertentu. Berbeda dengan pengertian indeks periodikal yang selama ini sudah dikenal, seperti Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) atau Indeks Harga Konsumen (IHK), kedua indeks harga tersebut menggambarkan perkembangan harga di suatu daerah/wilayah pada periode waktu tertentu terhadap harga periode tahun dasar.

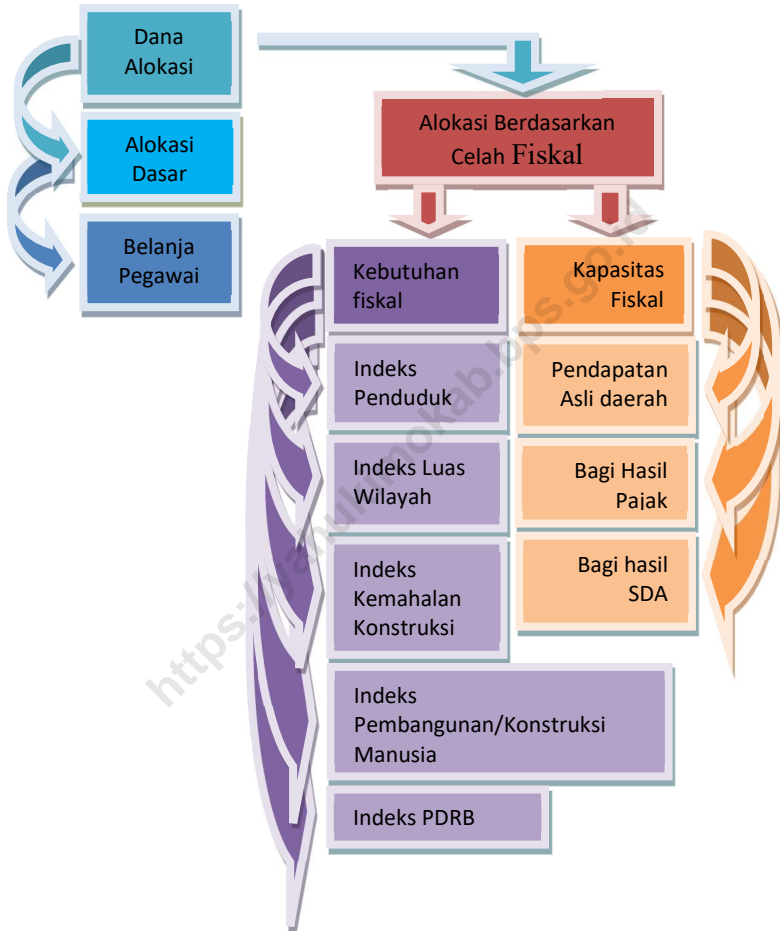
PENDAHULUAN

e. Produk Domestik Regional Bruto

Dalam penghitungan DAU, PDRB yang dihitung adalah PDRB perkapita yaitu dengan membagi PDRB atas dasar harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Angka PDRB perkapita merupakan ukuran untuk melihat kemajuan pembangunan suatu daerah ditinjau dari jumlah penduduk.

PENDAHULUAN

Gambar 2. Komponen DAU Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004



Sumber: Ditjen Perimbangan Keuangan, 2007 dalam Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, Departemen Keuangan

PENDAHULUAN

2. Variabel Kapasitas Fiskal

Variabel kapasitas fiskal mengindikasikan kemampuan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kapasitas fiskal suatu daerah diukur melalui tiga variabel yaitu pendapatan asli daerah, dana bagi hasil pajak, dan dana bagi hasil dari penerimaan sumber daya alam.

B. TUJUAN

Tujuan utama penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) tahun 2023 adalah untuk menyediakan data dasar dalam rangka kebijakan dana perimbangan 2023 dan utamanya digunakan sebagai salah satu variabel kebutuhan fiskal dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pengalokasian tahun 2023. Dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa IKK digunakan sebagai proksi untuk menggambarkan tingkat kesulitan geografis suatu daerah, dengan demikian semakin sulit letak geografis daerah tersebut maka semakin tinggi pula angka IKK-nya.

Disamping itu IKK juga merupakan sumber data yang bersifat spasial yang menggambarkan perbandingan antar wilayah untuk keperluan lainnya yang sesuai dengan cakupan yang lebih luas (seluruh kabupaten/kota di Indonesia).

PENDAHULUAN

C. RUANG LINGKUP

IKK Kabupaten/Kota tahun 2023 dihitung dalam versi 514 kabupaten/kota. IKK Provinsi tahun 2023 dihitung untuk 38 provinsi sama dengan penghitungan untuk tahun 2022.

Paket komoditas yang tercakup untuk penghitungan IKK meliputi 33 jenis bahan bangunan/konstruksi, 8 jenis sewa alat berat dan jasa 5 jenis pekerja.

BAB II

KONSEP DAN DEFINISI

Beberapa konsep dan definisi secara umum yang digunakan dalam proses pengumpulan data dan penghitungan indeks kemahalan konstruksi (IKK) antara lain: konsep mengenai harga barang konstruksi termasuk harga sewa alat berat, pedagang besar, pedagang campuran, kegiatan konstruksi, tingkat kemahalan konstruksi, diagram timbang, dan indeks kemahalan konstruksi.

Harga perdagangan besar (HPB) adalah harga yang terjadi karena transaksi penjualan bahan bangunan/konstruksi yang dilakukan oleh pedagang besar/distributor ke pedagang besar berikutnya atau kepada konsumen dalam jumlah besar (partai besar). Yang dimaksud dengan pengertian HPB disini adalah harga lokal loko gudang yaitu harga penjualan bahan bangunan/konstruksi yang dijual berada di tempat/gudang penjual.

Harga pedagang campuran adalah harga yang terjadi karena transaksi antara pedagang yang menjual barang dagangannya sebagian dilakukan secara partai besar dan sebagian lagi dilakukan secara eceran dengan konsumen, sedangkan data yang dicatat adalah harga untuk penjualan barang dalam partai besar.

KONSEP DAN DEFINISI

Harga produsen adalah transaksi yang terjadi antara produsen sebagai penjual dengan pedagang besar/distributor sebagai pembeli secara partai/grosir. Sedangkan yang dimaksud dengan harga eceran (HE) adalah harga yang terjadi karena transaksi penjualan bahan bangunan/konstruksi yang dilakukan oleh pedagang eceran ke konsumen.

HPB bahan bangunan/konstruksi adalah harga berbagai jenis bahan bangunan/konstruksi yang digunakan dalam kegiatan konstruksi dalam jumlah besar (partai) yang merupakan hasil transaksi antara pedagang besar/distributor/*supplier* bahan bangunan/konstruksi dengan pengguna bahan bangunan/ konstruksi tersebut.

Pedagang Besar (PB) adalah pedagang/distributor yang menjual bahan bangunan/konstruksi secara partai/grosir atau dalam jumlah besar.

Pedagang campuran adalah pedagang yang dapat menjual barang dagangannya dalam jumlah besar maupun eceran.

Partai/grosir atau jumlah besar yang dimaksud adalah bukan eceran. Batasan ini relatif mengingat sulit menentukan besarnya, baik kuantitas maupun nilai dari suatu komoditas. Hal ini sangat tergantung dari karakteristik komoditasnya sendiri.

Kegiatan Konstruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan

KONSEP DAN DEFINISI

tempat kedudukannya baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Hasil kegiatan antara lain: gedung, jalan jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan/konstruksi air dan drainase, bangunan/konstruksi sanitasi, landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan/konstruksi pembangkit listrik, transmisi, distribusi dan bangunan/konstruksi jaringan komunikasi. Kegiatan konstruksi meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran, dan perbaikan bangunan/konstruksi.

Berdasarkan KBLI 2005 yang disusun Badan Pusat Statistik yang merupakan revisi KBLI 2000, secara umum jenis bangunan/konstruksi konstruksi dikelompokkan menjadi lima macam, yaitu:

- i. Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal, mencakup rumah dan gedung yang digunakan untuk tempat tinggal oleh rumah tangga. Bangunan bukan tempat tinggal meliputi hotel, sekolah, rumah sakit, pusat pertokoan, perkantoran dan pusat perdagangan, industri atau pabrik, bangunan perdagangan, bangunan tempat pemeliharaan hewan, ternak dan unggas, bangunan tempat ibadah, bangunan gedung kesenian dan olahraga serta bangunan bukan tempat tinggal lainnya.

KONSEP DAN DEFINISI

- ii. Prasarana Pertanian meliputi pembuatan kolam pemeliharaan ikan, pintu pengendalai air, bagan, percetakan tanah sawah, pembukaan hutan, irigasi, dan sejenisnya.
- iii. Jalan, Jembatan, dan Pelabuhan, mencakup pembuatan sarana jalan dan jembatan untuk angkutan jalan raya maupun kereta api, pelabuhan laut dan udara, dermaga, landasan pesawat terbang, tempat parkir, trotoar dan sejenisnya.
- iv. Bangunan & Instalasi Listrik, Gas, Air Minum dan Komunikasi
Mencakup Bangunan/konstruksi Pengolahan Penyaluran dan Penampungan Air Bersih/Air Limbah/Drainase, Bangunan/konstruksi Pengolahan/Penyaluran dan Penampungan Barang Migas, Bangunan/konstruksi Elektrikal, Konstruksi Telekomunikasi Sarana Bantu Navigasi Laut dan Rambu Sungai, Konstruksi Telekomunikasi Navigasi Udara, Konstruksi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Konstruksi Elektrikal dan Telekomunikasi Lainnya, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air tanah, Instalasi Listrik Bangunan/konstruksi Sipil, Instalasi Navigasi Laut dan Sungai, Instalasi Meteorologi dan Geofisika, Instalasi Navigasi Udara, Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api, Instalasi Sinyal dan Rambu - Rambu Jalan Raya, Instalasi Telekomunikasi.

KONSEP DAN DEFINISI

v. Bangunan/konstruksi Lainnya

Mencakup Bangunan/konstruksi Terowongan, Bangunan/konstruksi Sipil Lainnya, Pemasangan Perancah, Pemasangan Bangunan/konstruksi Kostruksi Prefab dan Pemasangan Kerangka Baja, Pengerukan, Konstruksi Khusus Lainnya, Instalasi Jaringan Pipa, Instalasi Bangunan/konstruksi Sipil Lainnya, Dekorasi Eksterior, serta bangunan/konstruksi sipil lainnya termasuk peningkatan mutu tanah melalui pengeringan dan pengerukan.

Berdasarkan asas keterbandingan penghitungan IKK, bahwa untuk setiap daerah harus mempunyai bobot nilai di setiap jenis bangunan/konstruksi sedangkan pada kenyataannya tidak setiap kabupaten/kota memiliki kelima jenis bangunan/konstruksi tersebut, maka dalam penghitungan IKK jenis bangunan/konstruksi dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

i. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, terdiri dari:

- a. Kontruksi gedung tempat tinggal, meliputi: rumah yang dibangun sendiri, real estate, rumah susun dan perumahan dinas.

KONSEP DAN DEFINISI

- b. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi: konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal, stasiun dan bangunan/konstruksi monumental.
- ii. Bangunan/konstruksi pekerjaan umum untuk jalan, jembatan dan pelabuhan terdiri dari:
 - a. Bangunan/konstruksi jalan, jembatan dan landasan meliputi: pembangunan/konstruksi jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas.
 - b. Bangunan/konstruksi jalan dan jembatan kereta.
 - c. Bangunan/konstruksi dermaga meliputi: pembangunan/konstruksi, pemeliharaan dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan dan penahan gelombang.
- iii. Bangunan/konstruksi lainnya terdiri dari:
 - a. Bangunan/konstruksi sipil, pembangunan/konstruksi lapangan olah raga, lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman.
 - b. Bangunan/konstruksi pekerjaan umum untuk pertanian meliputi:
 - Bangunan/konstruksi pengairan diantaranya: pembangunan/konstruksi waduk (reservoir), bendung,

KONSEP DAN DEFINISI

- embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase irigasi, talang, check dam, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib dan viaduk.
- Bangunan/konstruksi tempat proses hasil pertanian, diantaranya bangunan/konstruksi penggilingan dan bangunan/konstruksi pengeringan.
 - c. Bangunan/konstruksi elektrik meliputi: pembangkit tenaga listrik, transmisi dan transmisi tegangan tinggi.
 - d. Konstruksi telekomunikasi udara meliputi: konstruksi bangunan/konstruksi telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan/konstruksi pemancar/ penerima radar, dan bangunan/konstruksi antenna.
 - e. Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, pembangunan/konstruksi konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api.
 - f. Konstruksi sentral telekomunikasi meliputi: bangunan/konstruksi sentral telepon/telegraph, konstruksi bangunan/konstruksi menara pemancar dan bangunan/konstruksi stasiun kecil.
 - g. Instalasi air meliputi instalasi air bersih dan air limbah dan saluran drainase pada gedung.

KONSEP DAN DEFINISI

- h. Instalasi listrik meliputi: pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan kuat.
- i. Instalasi gas meliputi: pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal.
- j. Instalasi listrik jalan
- k. Instalasi jaringan pipa: jaringan pipa gas, jaringan air dan jaringan minyak.

Harga sewa alat berat konstruksi adalah harga yang terjadi ketika seseorang/organisasi/institusi menyewa alat-alat berat yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dalam periode tertentu seperti dalam waktu jam, hari, minggu, atau bulan. Satuan/unit yang digunakan dalam harga sewa ini adalah satu unit/jam.

Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK) merupakan cerminan dari suatu nilai bangunan/konstruksi yang akan dibandingkan antar daerah, yaitu besarnya biaya yang dibutuhkan untuk membangun satu unit bangunan/konstruksi per satuan ukuran luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi yang diukur melalui sekelompok barang dan jasa yang digunakan.

Paket komoditas adalah sejumlah barang terpilih yang digunakan sebagai komponen penghitungan IKK. Komoditas /jenis

KONSEP DAN DEFINISI

barang tersebut dipilih karena memenuhi asas *representativeness dan comparability* yaitu andil yang cukup besar dan data harganya dapat dipantau dan mempunyai tingkat keterbandingan antar kabupaten/kota.

Diagram Timbang atau bobot yang digunakan dalam penghitungan IKK terdiri dari diagram timbang IKK menurut kelompok jenis bangunan/konstruksi dan diagram timbang umum. Diagram timbang kelompok jenis bangunan/konstruksi adalah bobot setiap jenis barang dan jasa dalam memperoleh nilai TKK masing-masing kelompok jenis bangunan/konstruksi. Diagram timbang umum adalah bobot setiap jenis bangunan/konstruksi dalam memperoleh IKK umum setelah diperoleh IKK masing-masing kelompok jenis bangunan/konstruksi.

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan Tingkat Kemahalan Konstruksi suatu kabupaten/kota atau provinsi terhadap Tingkat Kemahalan Konstruksi rata-rata nasional.

Berbeda dengan Indeks Harga Perdagangan Besar Konstruksi (IHPB konstruksi) yang merupakan indeks *periodical*, IKK merupakan indeks spasial yang menunjukkan perbedaan harga antar wilayah dalam waktu yang sama.

KONSEP DAN DEFINISI

Indeks Harga Perdagangan Besar Bahan Bangunan/Konstruksi adalah angka indeks yang menggambarkan besarnya perubahan harga pada tingkat harga perdagangan besar/grosir dari komoditas bahan bangunan/konstruksi di suatu negara/daerah. Secara makro ekonomi perubahan harga bahan bangunan/konstruksi dipengaruhi oleh faktor penawaran dan permintaan. Namun berbagai faktor yang juga mempengaruhi perubahan harga bahan bangunan/konstruksi adalah faktor biaya produksi dan faktor biaya transportasi.

Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Bahan Bangunan/konstruksi yang merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk keperluan perencanaan pembangunan/konstruksi yang dapat menggambarkan perkembangan statistik harga bahan bangunan/konstruksi di suatu daerah. Manfaat IHPB bahan bangunan/konstruksi semakin diperlukan terutama didalam penghitungan eskalasi nilai kontrak sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 dan telah direkomendasikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 105/PMK.06/2005 tanggal 9 Nopember 2005, serta didukung oleh Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. 11/SE/M/2005 tanggal 16 Desember 2005. Penyajian data IHPB konstruksi dibuat menjadi dua bentuk penyajian, yaitu :

KONSEP DAN DEFINISI

1) IHPB konstruksi menurut kelompok barang

Jumlah kelompok jenis barang yang dihitung dalam kelompok IHPB bahan bangunan/konstruksi adalah sebanyak 23 kelompok barang, yaitu kelompok kayu gelondongan; barang galian segala jenis; kayu gergajian dan awetan; kayu lapis dan sejenisnya; bahan bangunan/konstruksi dari kayu; cat, vernis, dan lak; aspal; hasil kilang minyak lainnya; barang-barang dari plastik; kaca lembaran; bahan bangunan/konstruksi dari keramik dan tanah liat; semen; batu split; barang-barang lainnya dari bahan bukan logam; barang-barang dari besi dan baja dasar; barang-barang dari logam dasar bukan besi; alat pertukangan dari logam; bahan bangunan/konstruksi dari logam; barang-barang logam lainnya; alat-alat berat dan perlengkapannya; mesin listrik dan pengatur listrik; perlengkapan listrik lainnya; dan aki.

2) IHPB konstruksi menurut kelompok bangunan/konstruksi.

IHPB konstruksi menurut kelompok bangunan/konstruksi dibagi dalam 5 jenis bangunan/konstruksi, yaitu :

- a. Bangunan/konstruksi tempat tinggal dan bukan tempat tinggal
- b. Bangunan/konstruksi pekerjaan umum untuk pertanian

KONSEP DAN DEFINISI

- c. Bangunan/konstruksi pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan
- d. Bangunan/konstruksi dan instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi
- e. Bangunan/konstruksi lainnya

Selanjutnya IHPB konstruksi umum yang merupakan indeks tertimbang dari indeks ke lima kelompok bangunan/konstruksi di atas digunakan dalam penyesuaian IKK secara nasional.

BAB III METODOLOGI

A. PAKET KOMODITAS

Data dasar penghitungan IKK adalah harga bahan bangunan/konstruksi dan sewa alat berat yang diperoleh dari survei HPB–K2 yang dilakukan secara bulanan. Harga tersebut meliputi harga 99 kualitas barang yang berasal dari 33 jenis barang sedangkan harga sewa 8 macam alat berat dan jasa 5 jenis pekerja ditetapkan sebagaimana IKK tahun 2022. Dalam pemilihan paket komoditas IKK, perlu diperhatikan azas pemilihan paket komoditas sebagai berikut :

- a. *Comparability* (keterbandingan)
 - *Specific product description*
 - *Characteristic determining price*
- b. *Representativeness* (mewakili)

Berdasarkan azas tersebut dapat ditentukan paket komoditas yang digunakan dalam penghitungan IKK 2022 yaitu terdiri dari 33 jenis bahan bangunan meliputi tanah uruk, pasir, batu pondasi, batu bata, batako, bata ringan, batu split, kayu balok, kayu papan, bahan bangunan siap pasang dari kayu kelas II, seng gelombang, paku, semen portland, besi beton, bak mandi, kloset, seng plat, pipa PVC, kayu lapis/triplek, cat emulsi, cat minyak, tegel/keramik,

METODOLOGI

genteng/atap, kaca, gypsum, kabel, mesin pompa air, rangka atap baja, aluminium, tangki air fiber, lampu, MCB, aspal; 8 sewa alat berat antara lain *excavator*, *bulldozer*, *loader*, *tandem/vibrating roller*, *dump truck*, *motor grader*, *asphalt finisher*, dan *generator set*; serta sewa 5 jasa pekerja konstruksi yaitu kepala tukang, tukang batu, tukang kayu, instalatir listrik, dan pembantu tukang.

B. DIAGRAM TIMBANG

Diagram timbang atau bobot terdiri dari diagram timbang kelompok jenis bangunan/konstruksi dan diagram timbang umum. Diagram timbang kelompok jenis bangunan/konstruksi digunakan untuk menghitung TKK sedangkan Diagram timbang umum digunakan untuk menghitung IKK.

1. Diagram Timbang Kelompok Jenis Bangunan/Konstruksi

Diagram timbang kelompok jenis bangunan/konstruksi disusun berdasarkan besarnya andil atau nilai masing-masing jenis bahan bangunan/konstruksi untuk membangun satu unit bangunan/konstruksi per satuan ukuran luas dan digunakan untuk menghitung tingkat kemahalan konstruksi.

Diagram timbang kelompok jenis bangunan/konstruksi menggunakan data kuantitas atau volume barang-barang konstruksi

METODOLOGI

termasuk sewa alat yang dibutuhkan atau digunakan untuk membangun 1 (satu) unit jenis bangunan/konstruksi. Jenis bangunan/konstruksi yang dimaksud terdiri dari tiga kelompok jenis bangunan/konstruksi, yaitu:

- i) Bangunan/konstruksi tempat tinggal dan bukan tempat tinggal;
- ii) Bangunan/konstruksi jalan, jembatan, dan pelabuhan; dan
- iii) Bangunan/konstruksi lainnya.

Data kuantitas atau volume barang-barang konstruksi dan sewa alat berat tersebut diperoleh melalui kegiatan yang disebut Studi Tingkat Kemahalan Konstruksi. Kegiatan studi ini dilakukan di 20 kabupaten/kota terpilih yang menyebar di 10 provinsi yang dilaksanakan pada bulan April 2003 dan April 2004. Kabupaten/kota-kabupaten/kota tersebut dipilih berdasarkan letak dan kondisi geografis serta struktur tanah yang berbeda sehingga data yang diperoleh dapat mewakili keseluruhan kondisi kabupaten/kota di Indonesia.

Dalam menyusun diagram timbang kelompok jenis bangunan/konstruksi, selain data hasil studi, ditunjang pula dengan data tabel Input-Output dan data yang diperoleh dari instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan kontraktor.

METODOLOGI

Sesuai dengan tujuan penyusunan IKK, maka penggunaan (kuantitas/volume) barang untuk membangun satu unit bangunan/konstruksi per satuan ukuran luas di masing-masing kabupaten/kota adalah sama, artinya seluruh kabupaten/kota menggunakan satu penimbang yang berlaku nasional meskipun memiliki struktur tanah dan kondisi yang berbeda.

METODOLOGI

2. *Bill of Quantity*

Penimbang IKK 2023 disusun berdasarkan data *Bill of Quantity* (BoQ) Dinas PU yang dikeluarkan untuk kegiatan konstruksi fisik, seperti pembangunan/konstruksi gedung kantor, rumah dinas, jalan, jembatan, lapangan olah raga yang sudah selesai dilaksanakan.

BoQ yang dikumpulkan disini merupakan nilai kontrak dan analisis harga dari pekerjaan proyek konstruksi yang sudah dilaksanakan pada tahun berjalan. Nilai kontrak ini yang akan digunakan sebagai penimbang pada IKK 2023.

Untuk tujuan membandingkan harga konstruksi antar wilayah/daerah, dikenal ada dua metode penghitungan, yaitu pertama dengan pendekatan input, dan kedua dengan pendekatan harga output. Pendekatan harga input yaitu dengan mencatat semua material penting yang digunakan digabung dengan upah dan sewa peralatan sesuai dengan bobotnya masing-masing. Kelemahan metode ini adalah bahwa kegiatan konstruksi dianggap mempunyai produktivitas sama dan tidak memepertimbangkan *overhead cost*. Pendekatan output kelemahannya adalah bahwa dalam harga bangunan sudah termasuk *management cost* dan keuntungan kontraktor yang bervariasi antar daerah dan antar proyek sehingga tidak memadai untuk tujuan membandingkan kemahalan konstruksi antar wilayah.

METODOLOGI

Alternatifnya adalah mengumpulkan harga konstruksi yang bisa mencakup *overhead cost* dan produktivitas pekerja tanpa memasukkan *management cost* dan keuntungan kontraktor. Caranya adalah dengan mengumpulkan harga komponen bangunan seperti harga dinding, atap, dan sebagainya. Apabila harga-harga komponen tersebut digabungkan maka akan didapatkan harga total proyek yang besarnya berada di atas harga input tetapi di bawah harga output karena sudah memasukkan *overhead cost* dan upah tetapi mengeluarkan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Data seperti ini bisa didapat dari dokumen *Bill of Quantity* (BoQ) satu proyek yang sudah selesai. Dengan digunakannya realisasi APBD pembentukan modal tetap sebagai salah satu penimbang IKK, maka setiap tahun IKK satu kabupaten/kota relatif terhadap kabupaten/kota berubah-ubah tergantung dari realisasi APBD masing-masing kabupaten/kota.

C. KEGIATAN PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data harga dilakukan di semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia melalui survei serentak khusus untuk barang-barang bahan bangunan/konstruksi yang menjadi paket komoditas IKK. Survei serentak tersebut dilaksanakan dalam 4 periode pencacahan yaitu akhir Juli 2022, akhir Oktober 2022, akhir Januari 2023, dan akhir April 2023.

METODOLOGI

Responden yang menjadi sumber data pada kegiatan survei serentak terdiri dari beberapa kategori yaitu pedagang besar/distributor, pedagang campuran, produsen, pedagang eceran, dan kategori lainnya seperti: kontraktor, PT. PLN dan Dinas Pekerjaan Umum (Kimpraswil) atau instansi terkait lainnya (khususnya untuk mengumpulkan data harga sewa alat-alat berat dan upah pekerja/jasa konstruksi).

Pemilihan responden dilakukan secara purposif dengan mengutamakan pedagang besar (PB). Jika pedagang besar tidak ada maka dipilih responden dengan urutan skala prioritas yaitu dari pedagang campuran, produsen dan pilihan terakhir yaitu pedagang eceran (PE). Sehingga jenis harga yang dikumpulkan dalam survei HPB-K ini terdiri dari harga perdagangan besar (HPB), harga produsen (HP), dan harga eceran (HE).

D. IDENTIFIKASI KUALITAS BARANG

Setelah menetapkan paket komoditas IKK 2023 dan harga bahan bangunan/konstruksi, kegiatan selanjutnya adalah melakukan kegiatan Survei Identifikasi Kualitas Barang (SIKB). Kegiatan ini dimaksudkan untuk validasi data harga dengan cara mengumpulkan data harga seluruh kualitas dari komoditas terpilih dan memastikan/mencocokkan bahwa jenis barang dan harga adalah untuk

METODOLOGI

jenis barang dengan kualitas yang ditetapkan dalam paket komoditas IKK. SIKB juga digunakan sebagai dasar justifikasi untuk mendapatkan harga dengan kualitas barang yang setara jika kualitas yang tercakup dalam paket komoditas tidak terdapat di provinsi tertentu.

E. FORMULA PENGHITUNGAN IKK 2023

Seperti halnya diagram timbang kelompok jenis bangunan/konstruksi, IKK kabupaten/kota dan IKK provinsi juga dihitung menurut kelompok jenis bangunan/konstruksi yang mengacu pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI).

Pada tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya, angka IKK disajikan menggunakan IKK rata-rata nasional sama dengan 100 yang disesuaikan dengan perkembangan harga bahan bangunan/konstruksi dengan menggunakan *inflator* yang mengikuti bulan dilaksanakannya survei harga secara serentak diseluruh kabupaten/kota di Indonesia. Inflator ini merupakan faktor pengali IKK dengan rata-rata nasional 100 sehingga didapatkan IKK dengan rata-rata sesuai dengan besarnya inflator.

IKK 2023 merupakan indeks yang bersifat spasial sehingga hanya dapat diperbandingkan antar wilayah, bukan antar waktu secara langsung. Namun IKK 2023 tidak menggunakan *inflator* seperti dijelaskan di atas. Hal ini dikarenakan metode penghitungan IKK 2023

METODOLOGI

menghasilkan angka yang relatif terhadap angka kabupaten/kota acuan, yaitu dengan Metode *Country Product Dummy* (CPD).

Pada penghitungan IKK tahun 2023 ini Kota Makassar dijadikan kota referensi (acuan) dengan maksud supaya ada keterbandingan dengan IKK tahun sebelumnya. Untuk IKK tingkat provinsi data harga yang digunakan adalah rata-rata geometrik setiap komoditi dari seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi masing-masing dengan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai provinsi referensinya.

Penghitungan IKK 2023 dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah **penghitungan nilai komponen konstruksi masing-masing sistem dari suatu bangunan untuk setiap kabupaten/kota**. Nilai komponen tersebut dihitung menggunakan nilai tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$NK_l = \sum_{m=1}^n p_m q_m$$

dengan:

NK_l = nilai komponen ke-l pada masing-masing sistem dari suatu bangunan di kabupaten/kota

p_m = harga material/upah/sewa alat ke-m

q_m = kuantitas/volume material/upah/sewa ke-m

METODOLOGI

n = jumlah material/upah/sewa dalam komponen ke-l

Tahap penghitungan kedua adalah menghitung **Purchasing Power Parity (PPP) system** menggunakan metode regresi Country Product Dummy (CPD). Model regresi CPD adalah sebagai berikut:

$$\ln NK_l = \alpha_x C_x + \beta_l P_l + \varepsilon_{xl}$$

dengan:

NK_l = Nilai Komponen ke-l

C_x = dummy kabupaten/kota ke-x

P_l = dummy komponen ke-l dalam suatu sistem dan Bangunan

ε_{xl} = galat

α_x dan β_l = Koefisien Regresi

PPP (*Purchasing Power Parity*) $_{sistem_k} = exp(\alpha_x)$

$$PPP_{sistem_k} = \left(\prod_{l=1}^n \frac{NK_{klx}}{NK_{kl0}} \right)^{1/n}$$

dengan:

PPP_{sistem_k} = *purchasing power parity* sistem ke-k

NK_{klx} = nilai komponen ke-l, sistem ke-k, di kabupaten/kota ke-x

NK_{kl0} = nilai komponen ke-l, sistem ke-k, di kabupaten/kota

acuan

METODOLOGI

n = jumlah komponen dalam suatu sistem

Tahap penghitungan ketiga adalah menghitung **PPP bangunan** menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot sistem) dengan rumus sebagai berikut:

$$PPP_{bangunan_j} = \left(\prod_{k=1}^n PPP_{sistem_k} \right)^{w_{2k}}$$

dengan:

$PPP_{bangunan_j}$ = *purchasing power parity* bangunan ke- j

n = Jumlah sistem dalam suatu bangunan

Tahap penghitungan keempat adalah menghitung **PPP proyek** menggunakan metode rata-rata geometrik dengan rumus sebagai berikut:

$$PPP_{proyek_i} = \left(\prod_{j=1}^n PPP_{bangunan_j} \right)^{\frac{1}{n}}$$

dengan:

PPP_{proyek_j} = *purchasing power parity* proyek ke- i

n = Jumlah sistem dalam suatu proyek

Dalam menghitung PPP sistem diperlukan suatu kota acuan sebagai pembanding. Kota acuan ditetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan, misalkan **pusat distribusi barang, harga cenderung**

METODOLOGI

stabil, variasi harga cenderung berada di sekitar harga rata-rata nasional, dan sebagainya.

$$C_0 = \text{dummy kota acuan} = 0$$

Tahap penghitungan terakhir adalah menghitung **IKK kabupaten/ kota** menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot APBD) dengan rumus sebagai berikut:

$$IKK_{kab/kota} = \left(\prod_{i=1}^n (PPP_{proyek_i})^{w_i} \right) \cdot 100$$

dengan:

n = Jumlah proyek dalam suatu kabupaten/ko

BAB IV

ANALISIS IKK KABUPATEN YAHUKIMO

A. Profil Kabupaten Yahukimo

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001 pemerintah Indonesia telah melaksanakan kebijakan tentang otonomi daerah untuk melakukan percepatan pembangunan di beberapa wilayah potensial, termasuk Propinsi Papua. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang kemudian menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2022 mengatur mengenai pembentukan Provinsi Papua Pegunungan yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Papua Pegunungan berasal dari sebagian besar wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Memberamo Tengah, Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Nduga, Ibu kota Provinsi Papua Pegunungan berkedudukan di Kabupaten Jayawijaya.

Kabupaten Yahukimo merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya. Ibukota Kabupaten Yahukimo

ANALISIS

berada di Distrik Dekai. Kabupaten Yahukimo terdiri dari 51 distrik yakni:

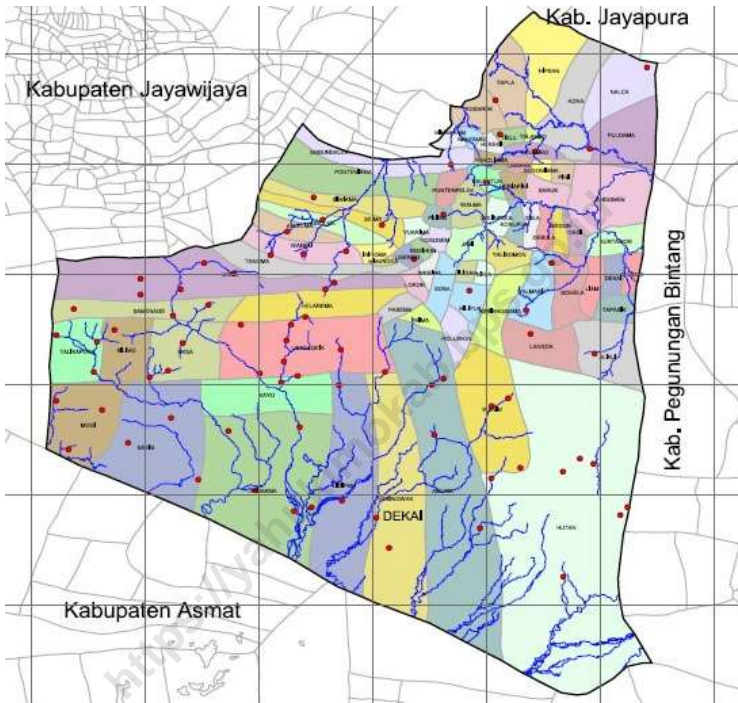
- 1) Distrik Kurima,
- 2) Distrik Ninia,
- 3) Distrik Anggruk,
- 4) Distrik Dekai,
- 5) Distrik Obio,
- 6) Distrik Suru-Suru,
- 7) Distrik Wusama,
- 8) Distrik Amuma,
- 9) Distrik MUSAIK,
- 10) Distrik Pasema,
- 11) Distrik Hogio,
- 12) Distrik Mugi,
- 13) Distrik Soba,
- 14) Distrik Werima,
- 15) Distrik Tangma,
- 16) Distrik Ukha,
- 17) Distrik Panggema,
- 18) Distrik Kosarek,
- 19) Distrik Nipsan,
- 20) Distrik Ubahak,
- 21) Distrik Pronggoli,
- 22) Distrik Walma,
- 23) Distrik Yahuliambut,
- 24) Distrik Hereapini,
- 25) Distrik Ubalihi,
- 26) Distrik Talambo,
- 27) Distrik Puldama,
- 28) Distrik Endomen,
- 29) Distrik Kona, Distrik
- 30) Dirwemna,
- 31) Distrik Holuwon,
- 32) Distrik Lolat,
- 33) Distrik Soloikma,
- 34) Distrik Sela,
- 35) Distrik Korupun,
- 36) Distrik Langda,
- 37) Distrik Bomela,
- 38) Distrik Suntamon,
- 39) Distrik Seradala,
- 40) Distrik Sobaham,

ANALISIS

- 41) Distrik Kabianggama,
- 42) Distrik Kwelamdua,
- 43) Distrik Kwikma,
- 44) Distrik Hilipuk,
- 45) Distrik Duram,
- 46) Distrik Yogosem,
- 47) Distrik Kayo,
- 48) Distrik Sumo,
- 49) Distrik Silimo,
- 50) Distrik Samenage, dan
- 51) Distrik Nalca.

Secara astronomis Yahukimo terletak pada $138^{\circ}45''$ - $140^{\circ}154'$ Bujur Timur dan $3^{\circ}39' - 5^{\circ}02'$ LS. Sedangkan secara geografis Yahukimo berbatasan langsung dengan Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Keerom di sebelah utara, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Asmat di sebelah selatan, Kabupaten Nduga di sebelah barat dan Kabupaten Pegunungan Bintang di sebelah timur.

Gambar 3. Peta Kabupaten Yahukimo



Wilayah Kabupaten Yahukimo mempunyai topografi yang bervariasi antara 100 meter sampai dengan 3.000 meter di atas permukaan laut (dpl), dimana sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan (dataran tinggi) yang dilalui beberapa aliran sungai dan anak sungai yang berasal dari bukit dan gunung yang ada disekitarnya. Dataran rendah yang ada di Kabupaten Yahukimo berupa hutan dan

ANALISIS

rawa berair yang meliputi distrik Dekai, Seradala, Sumo, Obio dan Suru-suru.

Pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Yahukimo yang merupakan daerah hutan yang memiliki luas sekitar 1.675.172 Ha. Kawasan hutan tersebut terdiri dari Hutan Lindung (678.757 Ha), Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (379.673 Ha), Hutan Produksi (296.693 Ha), Hutan Produksi Konversi (278.510 Ha), Hutan Produksi Terbatas (8 Ha), Areal penggunaan lain (15.051 Ha) dan kawasan pertanian (26.480 Ha).

Kabupaten Yahukimo mempunyai lahan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian berupa pertanian tanaman pangan yang meliputi tanaman padi ladang dan umbi-umbian, palawija (jagung, ubi jalar, ketela pohon, kacang tanah dan kacang kedelai) dan jenis tanaman hortikultura yaitu sayur- sayuran yang tersebar di setiap distrik.

B. IKK Kabupaten Yahukimo

IKK Provinsi Papua Pegunungan pada tahun 2023 adalah sebesar 251,25. Berdasarkan angka ini dapat dikatakan bahwa kondisi geografis Provinsi Papua Pegunungan paling sulit diantara 38 provinsi lainnya dimana Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yakni Kota Makassar dijadikan sebagai acuan (IKK = 100).

ANALISIS

IKK Kabupaten Yahukimo pada tahun 2023 adalah 157,72. IKK Kabupaten Yahukimo berada dibawah rata-rata IKK Provinsi Papua Pegunungan. Hal ini bukan menggambarkan bahwa tingkat kesulitan geografis Kabupaten Yahukimo dibawah tingkat kesulitan geografis rata-rata Provinsi Papua Pegunungan, akan tetapi akses pengangkutan barang yang lebih mudah.

Pada tahun 2022, IKK Kabupaten Yahukimo adalah 192,57. Rendahnya angka IKK pada Kabupaten Yahukimo menunjukkan bahwa harga bahan bangunan atau nilai bangunan di Yahukimo tidak terlalu tinggi dalam kurun satu tahun dimana salah satunya semakin mudahnya angkutan barang yang masuk ke Kabupaten Yahukimo.

ANALISIS

IKK Kabupaten Yahukimo dan sekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Pegunungan 2023

Kabupaten/Kota	IKK
(1)	(2)
Kab. Nduga	240,78
Kab. Jayawijaya	242,06
Kab. Lanny Jaya	269,07
Kab. Tolikara	264,48
Kab. Mamberamo Tengah	301,29
Kab. Yalimo	254,48
Kab. Yahukimo	157,72
Kab. Pegunungan Bintang	316,57
Prov. Papua Pegunungan	251,25
Kota Makassar	100,00

Sumber: *Indeks Kemahalan Konstruksi 2023, Badan Pusat Statistik*

Apabila dilihat dari kabupaten yang letaknya di sekitar Kabupaten Yahukimo, kabupaten dengan IKK tertinggi adalah kabupaten Pegunungan Bintang diikuti Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nduga, dan Kabupaten Yahukimo. Dari Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa perhitungan data IKK menetapkan Kota Makassar yang merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kota acuan. Dalam hal ini penggunaan salah satu

ANALISIS

ibukota provinsi sebagai acuan dalam menghitung IKK adalah memberikan fleksibilitas dalam penghitungan IKK apabila ada penambahan jumlah kabupaten/kota yang akan dihitung IKK-nya dan literatur tentang indeks spasial pada umumnya mengacu pada satu wilayah tertentu sebagai dasar. Semakin besar nilai IKK suatu kabupaten pemekaran dibandingkan IKK rata-rata nasional maka akan semakin besar pula selisih IKK rata-rata Provinsi Papua dengan IKK rata-rata nasional dalam hal ini IKK Provinsi Sulawesi Selatan.

Dari perbandingan harga dan sarana transportasi di Kabupaten Yahukimo dapat dijelaskan sebagai berikut:

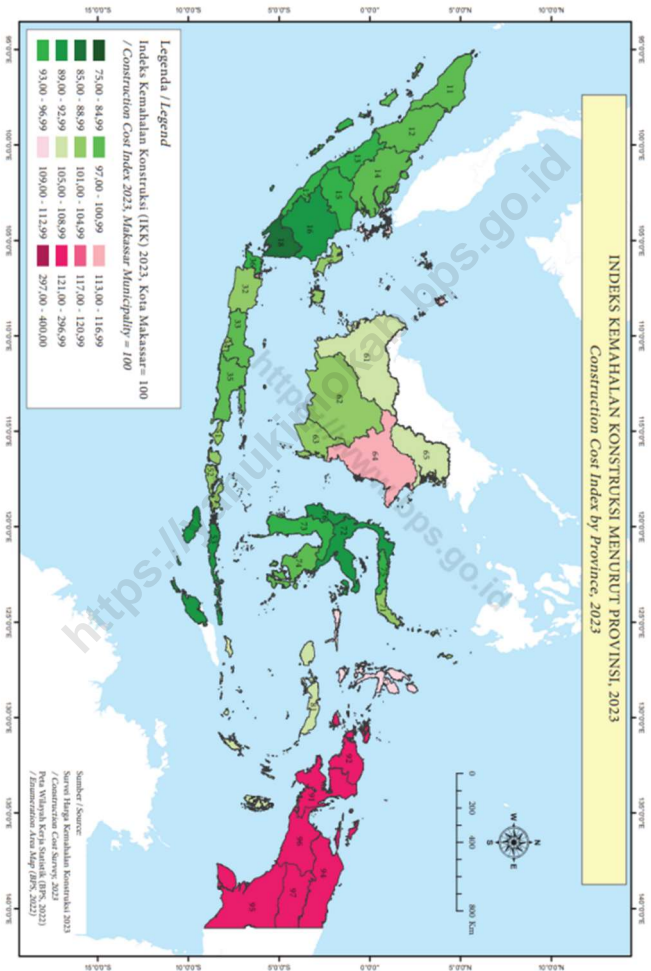
- i. Asal barang dari Kota Jayapura didistribusikan melalui sarana transportasi udara langsung ke Kabupaten Yahukimo.
- ii. Untuk barang pabrikan dan konstruksi berasal dari Kabupaten Mimika dan Merauke dapat didistribusikan ke Ibukota Kabupaten Yahukimo melalui transportasi sungai dengan bergantung pada pasang surut air sungai, jika sungai pasang maka arus barang dari Kabupaten Mimika akan lancar ke Kabupaten Yahukimo, sebaliknya jika sungai surut maka arus barang menjadi sangat terhambat.

Berdasarkan kondisi arus barang Kabupaten Yahukimo sebagian besar masih dipasok dari Kabupaten Mimika, kemudian dari Kabupaten Merauke, Kota Jayapura dan Kabupaten Jayawijaya. Hal ini dapat dikatakan bahwa Kabupaten Yahukimo mempunyai asal barang

ANALISIS

yang berbeda dengan kabupaten-kabupaten yang berada di pegunungan tengah, sehingga nilai IKK Kabupaten Yahukimo merupakan nilai yang terendah dibanding IKK kabupaten-kabupaten di Pegunungan Tengah Papua. Berdasarkan kondisi arus barang Kabupaten Yahukimo dapat dikatakan bahwa Kabupaten Yahukimo mempunyai asal barang yang sama, variasi barangpun dimungkinkan akan sama karena Kabupaten Jayawijaya menjadi salah satu kabupaten asal untuk arus barang walaupun dari Kabupaten Jayawijaya ke kabupaten pemekaran melewati jalur yang berbeda-beda. Dilihat dari nilai IKK yang tidak signifikan menunjukkan kesulitan geografis antar kabupaten pemekaran dengan Kabupaten Yahukimo.

Gambar 4. Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Provinsi 2023



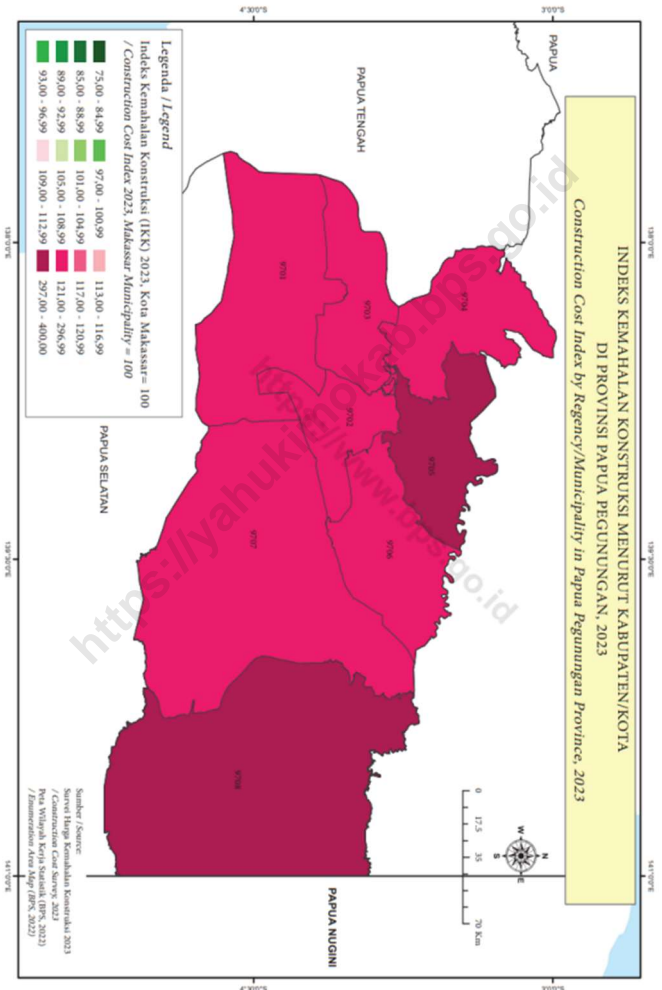
Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi 2023, Badan Pusat Statistik

Tabel 3. Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan, 2023

No.	Kode	Kabupaten/Kota	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	9701	KAB NDUGA	240,78
2	9702	KAB JAYAWIJAYA	242,06
3	9703	KAB LANNY JAYA	269,07
4	9704	KAB TOLIKARA	264,48
5	9705	KAB MAMBERAMO TENGAH	301,29
6	9706	KAB YALIMO	254,48
7	9707	KAB YAHUKIMO	157,72
8	9708	KAB PEGUNUNGAN BINTANG	316,57

Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi 2023, Badan Pusat Statistik

Gambar 5. Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Pegunungan 2023



Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi 2023, Badan Pusat Statistik

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2005. *Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota Se Jawa Bali)*. Salatiga : Jurnal Studi Pembangunan/konstruksi Kritis. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Abimanyu, Anggito. 2005. *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih*. Bapekki Depkeu.
- Badan Pusat Statistik RI. 2023. *Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2023*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Brata, Aloysius Gunadi. 2004. *Komposisi Penerimaan Sektor Publik Dan Pertumbuhan Ekonomi Regional*. Yogyakarta : Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya.
- Khusaini, Muhammad, SE, MSS, MA. 2006. *Ekonomi Publik, Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan/konstruksi Daerah*. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2005. *Dana Alokasi Umum*. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, Departemen Keuangan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2005 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota.
- UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

UU Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.

_____. 2008. *Kegiatan Percepatan Penyediaan Data Statistik
dalam Rangka Kebijakan Dana Perimbangan Tahun 2008.*

Padang: Simposium Nasional Akuntansi IX.

_____. 2010. *Kegiatan Percepatan Penyediaan Data Statistik
dalam Rangka Kebijakan Dana Perimbangan Tahun 2010.*

Padang: Simposium Nasional Akuntansi IX.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Enlighten The Nation



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN YAHUKIMO**

Jl. Yahuli, Sumohai, Dekaj, Papua, Indonesia

Telp: 085211010187, Mailbox : ipds9416@bps.go.id, bps9416@bps.go.id